

## BAB II

### MENANAMKAN NILAI-NILAI KESUSILAAN OLEH GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

#### A. Menanamkan Nilai-Nilai Kesusilaan

##### 1. Pengertian Nilai-Nilai

Nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *value* biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Ngali Purwanto, (2004:24). mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Kosasih. (2007:87). mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa “cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan

Sri Sumarmi. (2012:98) mengemukakan bahwa *menilai* berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (sebagai standar), untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan itu dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik dan seterusnya. Andi Prastowo. (2012:78) nilai pada dasarnya disebut sebagai

standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Winataputra (2009:90), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik memang berharga. Sebagaimana terbentuknya, nilai juga mempunyai karakteristik tertentu untuk berubah. Karena nilai diperoleh dengan cara terpisah, yaitu dihasilkan oleh pengalaman budaya, masyarakat dan pribadi yang tertuang dalam struktur psikologis individu

Dengan pengetahuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai adalah suatu konsep atau sebuah keyakinan yang abadi dan dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang, yang dengan konsep itu seseorang dipandang baik secara personal dan sosial, bahkan merupakan kekuatan dalam melahirkan motivasi untuk menentukan tingkah laku seseorang.

## 2. Pengertian Kesusilaan

Susila berasal dari kata “su” dan “sila”. Su adalah awalan yang berarti amat baik, atau sangat baik, mulia, dan indah. Sedangkan kata sila berarti tingkah laku atau kelakuan. Hamalik, (2003:202). Susila berarti tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kesusilaan artinya perihal susila (beradab, sopan, tertib), berkenaan dengan adab (kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti) dan sopan santun, sesuai dengan norma-norma tata susila, menurut kebiasaan disuatu tempat pada suatu

masa.

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai individu manusia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorong ia berbuat baik dan bertindak. Berbuat yang baik (Susila) yang selaras dengan ajaran agama atau dharma adalah cermin dari manusia yang Susila. Manusia Susila adalah manusia yang memiliki budhi pekerti tinggi yang bisa diterima oleh lingkungan di mana orang itu berada

Wijaya, 2009:87) Kesusilaan adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta (lingkungan) yang berlandaskan atas kasih sayang

Leibniz (dalam Siagian, 2006:89). bahwa kesusilaan adalah hasil suatu “menjadi” yang terjadi di dalam jiwa. Yang dinamakan kesusilaan ialah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Dengan kata lain kesusilaan menanamkan wajib dan darma. Secara demikian kesusilaan mengatur perilaku manusia serta masyarakat, yang di dalamnya manusia tersebut ada. Berhubung dengan itu manusia tidak boleh semaunya sendiri berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perilakunya diatur atau ditentukan oleh norma kesusilaan.

Dapat juga dikatakan bahwa manusia dibentuk oleh kesusilaan. Ini berarti bahwa kehidupan alaminya, seperti nafsunya, kecenderungan, cita-cita, dan sebagainya, seolah-olah disalurkan atau tertuang ke dalam bentuk tertentu. Demikianlah, umpanya, perwujudan seksualitas, suatu keadaan alami, mendapatkan pembatasan, disalurkan atau dibentuk oleh aturan-

aturan yang mengatakan bahwa bagaimana seharusnya.

Ngalim Purwanto, (2004). Nilai kesusilaan merupakan kumpulan aturan yang berlaku dalam bidang-bidang kehidupan manusia, aturan-aturan tersebut sebagai syarat-syarat kesusilaan, kadang-kadang bersifat tertulis dan kadang-kadang tidak. Di atas telah diberikan contoh mengenai ketentuan-ketentuan moral yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dalam bidang kesusilaan banyak yang tetap dihayati di dalam keinsyafan kesusilaan manusai-manusia yang bersangkutan. Jelaslah kiranya tidak ada moral tunggal yang diterima oleh segenap manusia, melainkan terdapat banyak moral yang berbeda-beda menurut waktu, tempat dan keadaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesusilaan upaya membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan dan memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kesusilaan menggambarkan keadaan dimana orang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik

### **3. Program Menanamkan Nilai-Nilai Kesusilaan**

Untuk mencapai tujuan pembelajaran kompetensi, siswa sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama, sehingga dalam proses belajar-mengajar siswa dituntut kreativitasnya secara penuh bahkan secara individual. Dengan demikian peranan guru di sini adalah sebagai fasilitator. Terdapat karakteristik penting dari pembelajaran kompetensi, seperti kegiatan proses belajar mengajar dalam KBM tidak hanya sekedar



menyampaikan materi, akan tetapi diselenggarakan untuk membentuk watak, peradaban, dan mutu kehidupan peserta didik.

S. Nasution (2003:89) Indikator dalam menanamkan Nilai-nilai kesusilaan:

a. Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

Kompetensi menurut UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Sumarjono, 2008:66). Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan

Sumitro (2006: 38) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas - tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.

b. Menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran (*instructional material*) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Menurut Hambalik (2003:45) ada tiga pengertian materi pembelajaran yaitu:

Merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/ instruktur untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran; 2) segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas; 3) seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran.

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Artinya materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator. Bahan ajar atau materi pembelajaran (*instructional materials*) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai.

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan

Siswa adalah individu-individu yang unik. Setiap mereka mempunyai perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan variasi-variasi pembelajaran untuk menunjang dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu materi pembelajaran. Ngalim Purwanto, (2004:78) Kesempatan menjelaskan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kondisi siswa untuk menjelaskan apa yang dipelajari, dipahami, agar dapat mengungkapkan kesulitan yang dihadapi.

Somantri, (2011:90) Kesempatan menjelaskan berarti memberikan kesempatan untuk menyajikan informasi lisan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan apa yang telah dipahami oleh siswa. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa, melibatkan siswa untuk berpikir, berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang agar dapat mengajak siswa untuk berpikir sehingga siswa mampu mengembangkan ide dan konsep yang dimiliki.

#### **4. Evaluasi Penanaman Nilai-Nilai Kesusilaan**

Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil penanaman nilai-nilai kesusilaan yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa.

Evaluasi menurut Hadari Nawawi, (2004:89) Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolok ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:90) Evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Sumarjon, (2008:90) Dalam menilai penanaman nilai-nilai kesusilaan ada dua indikator yang harus diperhatikan:

b. Menilai kemajuan belajar siswa

Kemajuan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan (Hambalik, 2003:211). Secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Riduan, 2002:55). Pembelajaran bertujuan membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai



pengendali sikap dan perilaku siswa menjadi bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Menurut Andi Prastowo (2012:76) menilai kemajuan belajar sebagai proses atau aktivitas dipengaruhi beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan menjadi: faktor yang berasal dari dalam diri orang yang belajar (internal) dan faktor dari luar (*eksternal*). Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut.

c. Memberikan tugas

Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan fungsi pokok dan usaha yang paling strategis guna mewujudkan tujuan intruksional yang diembang oleh lembaga tersebut. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas instruksional itu diperlukan tenaga pengelola yang terampil dan profesional, karena di tangan para gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan di sekolah.

Salah satu usaha untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai kesusilaan bagi murid sekolah adalah dengan memberikan tugas. S .

Nasution (2003:19) mendefinisikan bahwa Tugas pembelajaran adalah suatu cara untuk memastikan keterlibatan pelajar dengan pelajaran yang baru. Membangun dialog dengan membuat tugas pembelajaran yang berguna adalah satu cara pengajaran yang efektif, dapat di deskripsikan bahwa pemberian tugas merupakan salah satu cara atau metode mengajar yang menuntut agar siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga ia mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan di luar jam pelajaran.

## **B. Guru Pendidikan Kewarganegaraan**

### **1. Pengertian Guru**

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik

Sumarjono. (2008:12). guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Namun, Suparlan (2008:13) juga menambahkan bahwa

secara legal formal, guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar. Menurut Wasty Soemantoe. (2005:90), guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, guru adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek.

## **2. Materi Pembelajaran Oleh Guru**

Penguasaan guru terhadap materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup komponen yang hendak dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari:

### **a. Pengetahuan Kewarganegaraan**

Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara, berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem

sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945 maupun yang terkonvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

Pokok-pokok bahasan pembelajaran pengetahuan

Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) mencakup:

Hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional, peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hubungan dasar Negara dan konstitusi, mengharagai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, sistem politik Indonesia, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan internasional dan organisasi internasional, sistem hukum dan peradilan internasional, Pancasila sebagai ideologi terbuka, sistem pemerintahan, peran pers dalam masyarakat demokrasi, dampak globalisasi (BSNP, 2006: 23-238).

b. Ketrampilan Kewarganegaraan

Ketrampilan Kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan ketrampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup beberapa hal yaitu *intellectual skills* (ketrampilan intelektual) dan *participation skills* (ketrampilan partisipasi). Ketrampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab antara lain berpikir kritis.



Komponen ketrampilan intelektual warga negara meliputi:

- 1) Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi ketrampilan membedakan, mengelompokkan mengklasifikasikan, menentukan bahwa sesuatu itu asli. (memberikan uraian/ilustrasi)
- 2) Menjelaskan (mengklarifikasikan/menafsirkan)
- 3) Menganalisis, menyangkut kemampuan untuk menguraikan
- 4) Mengevaluasi pendapat/posisi
- 5) Mengambil pendapat/posisi
- 6) Mempertahankan pendapat/posisi (Cholisin, 2006: 5-6).

Ketrampilan partisipasi akan terwujud apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan. Cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya apabila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Komponen ketrampilan partisipasi mencakup berinteraksi, memantau dan mempengaruhi. Ketrampilan partisipasi yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan mencakup:

- 1) Berinteraksi (termasuk berkomunikasi) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik.
- 2) Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik.
- 3) Mempengaruhi proses politik, pemerintahan baik secara formal maupun informal (Cholisin, 2006: 6).

#### c. Karakter Kewarganegaraan

Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, sistem politik yang berfungsi sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum. Ciri-ciri/karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan)

meliputi:

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri).
- 2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif.
- 5) Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat (Cholisin, 2006:7).

Komponen-komponen tersebut harus dikembangkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang memiliki kompetensi berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi berbagai isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara bertanggung jawab agar masyarakat Indonesia dapat berdampingan dengan bangsa-bangsa lain secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang diharapkan agar siswa mempunyai kemampuan:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006: 232).

Tujuan yang diharapkan tersebut akan terwujud apabila didukung oleh guru yang menguasai materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara mendalam, dan mampu mengaitkannya

dengan kehidupan yang dialami oleh siswa. Selain penguasaan guru terhadap materi pelajaran, tercapainya tujuan pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga sangat dipengaruhi oleh penguasaan guru terhadap pembelajaran. Tanpa adanya ketrampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran maka tujuan yang diharapkan pun akan sulit dicapai.

Samana (2004:62) menyatakan bahwa dalam pengelolaan program belajar mengajar guru diharapkan:

Menguasai secara fungsional tentang pendekatan-pendekatan sistem pengajaran, asas-asas pengajaran, prosedur-metode-strategi-teknik pengajaran, menguasai secara mendalam serta berstruktur bahan ajar, dan mampu merancang penggunaan fasilitas pengajaran (dalam banyak hal, guru diharap mampu membuat alat bantu atau media pengajaran).

Guru harus mampu menyusun dan membuat rencana pengajaran sebelum proses belajar mengajar berlangsung, sehingga kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang sistematis dan tidak menjadi kegiatan yang acak. Selain kemampuan guru dalam menyusun dan membuat rencana pengajaran, kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan media dan metode pembelajaran juga sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Ditjen Dikdasmen (Depdiknas, 2001: 34) penguasaan pengelolaan pembelajaran Kewarganegaraan meliputi:

Menyusun rencana pembelajaran tahunan, semesteran/catur wulan dan mingguan, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik metode yang digunakan, menyusun satuan pembelajaran (Lesson Plan), meliputi tujuan, materi, metode, media dan

sumber belajar, menerapkan ketrampilan dasar dalam pembelajaran Kewarganegaraan; melakukan bimbingan akademis dan kepribadian kepada peserta didik, melaksanakan pembelajaran berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan.

Guru harus mamapu menyesuaikan antara materi pelajaran dan media serta metode yang akan digunakan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam mengelola pembelajaran adalah kemampuan mengenal dan menggunakan metode mengajar, kemampuan memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, kemampuan melaksanakan program belajar mengajar, kemampuan mengenal potensi siswa serta kemampuan merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial.

Kemampuan yang juga harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemampuan mengevaluasi pembelajaran penting dimiliki oleh guru. Kegiatan evaluasi dilakukan agar guru dapat melakukan tindak lanjut setelah mengetahui prestasi belajar siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (2003: 174):

Dengan mengetahui potensi belajar siswa, apalagi secara individual guru yang bijaksana dan memahami karakteristik siswa akan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih bervariasi serta akan memberikan kegiatan belajar mengajar yang berbeda antar siswa yang berprestasi tinggi dan akan mencarikan kegiatan belajar mengajar tertentu bagi siswa yang berprestasi rendah seperti kegiatan remedi dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan prestasi siswa.

Evaluasi terhadap hasil belajar siswa akan memberikan banyak



informasi kepada guru tentang berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Melalui hasil evaluasi dapat memberikan motivasi kepada guru untuk lebih bervariasi dalam menggunakan metode dan media, melakukan remedi untuk siswa yang berprestasi rendah.

Evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas penguasaan dasar evaluasi, memilih dan mengembangkan metode evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, melaksanakan evaluasi, penskoran, dan interpretasi hasil evaluasi, menggunakan hasil-hasil evaluasi untuk kepentingan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengevaluasi efektifitas pembelajaran (Depdiknas, 2013: 34).

### **3. Program Guru**

Pembelajaran merupakan salah satu bentuk program, karena pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan yang matang. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran melibatkan berbagai orang, baik guru maupun siswa, memiliki keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang satu dengan kegiatan pembelajaran yang lain, yaitu untuk mencapai kompetensi bidang studi yang pada akhirnya untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan, serta berlangsung dalam sebuah lembaga atau instansi.

Menurut Fakhruddin (2012: 35) Program pengajaran atau progjar adalah salah satu isi dari paket instruksi, progjar dibuat dengan tujuan agar

dalam proses pembelajaran terarah dan sistematis tidak menyimpang dari pokok-pokok materi yang akan disampaikan, sehingga tercapainya tujuan dari sasaran pendidikan khususnya dalam penyampaian materi. Ahmad Sudrajat (2010:37) Program pengajaran adalah perangkat kegiatan belajar mengajar yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang kita sebut dengan tujuan instruksional. Karena penyelenggaraan pengajaran di sekolah dilakukan dalam system semester, maka program pengajaran disusun dalam dua tahap, yaitu program semester dan program tatap muka (penjabaran dari program semester). Program diasumsikan sebagai rancangan kegiatan selama satu periode atau satu tahun, atau rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Berdasarkan definisi program pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan melibatkan sekelompok orang (guru dan siswa) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang dimaksud adalah pencapaian hasil belajar yang berasal dari standar kompetensi.

#### **4. Tugas Guru**

Sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya, guru khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan dan pada kondisi itu pula ia belajar memersosialisasikan sikap keguruan yang

diperlukannya. Seorang yang berpribadi khusus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan keguruan yang akan ditransformasikan kepada anak didik atau siswanya. Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat yang juga memiliki beberapa tugas menurut Rostiyah (2000 : 36) mengemukakan bahwa fungsi dan tugas guru profesional adalah : Menyerahkan pengetahuan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. 2 Tahun 2013 Sebagai prantara dalam belajar Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan.

Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Sukirno, (2011:90)

Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua ke dua. Dimana ia harus menarik simpati dan menjadi idola para siswanya. Adapun yang diberikan atau disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi hidupnya terutama dalam belajar. Bila seorang guru berlaku kurang menarik, maka kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa.

Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus

mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua ke dua. Dimana harus menarik simpati dan menjadi idola para siswanya. Adapun yang diberikan atau disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi hidupnya terutama dalam belajar. Bila seorang guru berlaku kurang menarik, maka kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa Siagian. (2006). Ada 3 tugas pokok guru dalam pendidikan :

a. Guru Sebagai Pengajar

Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Maka, dalam hal ini guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Situmorang, (2009:89) menyatakan

Mengajar berarti menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Menjadikan siswa dari tidak mengetahui menjadi mengetahui tentang berbagai disiplin ilmu sesuai mata pelajaran masing-masing. Fokus utamanya adalah aspek kognitif (intellectual) siswa. Mengajar dilaksanakan dengan berbagai strategi dan metode, serta media pembelajaran yang sesuai. Tugas mengajar ini dapat dilakukan oleh semua orang dewasa.

Peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil



atau tidaknya proses belajar, dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan kata lain guru harus mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya.

#### b. Guru Sebagai Pendidik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Bab XI Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa Guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Situmorang, (2009:89) menyatakan

Tugas guru sebagai pendidik merupakan tugas yang boleh dikatakan agak rumit. Tugas mendidik berkaitan dengan sikap dan tingkah laku (afektif) yang akan dikembangkan pada siswa. Mendidik berarti mengubah tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik.

Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

#### c. Guru Sebagai Pelatih

Melatih: Melatih bila ditinjau dari segi isi adalah berupa keterampilan atau kecakapan hidup (*life skills*). Bila ditinjau dari

prosesnya, maka melatih dilakukan dengan menjadi contoh (role model) dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau dari strategi dan metode yang dapat digunakan, yaitu melalui praktik kerja, simulasi, dan magang. Situmorang, (2009:89) menyatakan

Tugas guru melatih siswa untuk memiliki sejumlah keterampilan dan kecakapan sesuai mata pelajaran masing-masing. Pada sekolah umum, maka keterampilan dan kecakapan yang dimaksud disini adalah keterampilan dan kecakapan dasar. Berbeda dengan sekolah kejuruan yang memberikan keterampilan dan kecakapan lanjutan.

Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya sebagai seorang pendidik, semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang. Dengan kata lain potret manusia yang akan datang tercermin dari potret guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika kehidupan sangat bergantung dari "citra" guru di tengah-tengah masyarakat

## C. Pendidikan Kewarganegaraan

### 1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri siswa. Eko Budi Santoso, (2012:75) mengatakan bahwa "Pendidikan Kewarganegaraan Negara (PKN) merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk

membentuk atau membina warga negara yang baik, yaitu warganegara yang tahu, mau dan mampu berbuat baik”. Soemantri (Eko Budi Santoso, 2012) lebih lanjut, mengatakan bahwa “sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pendidikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia Kosasih Djahiri (Wanda Rizky Febrianto, 2011) mengungkapkan bahwa:

Pendidikan kewarganegaraan atau *Civic Education* adalah program program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan (*Humanizing*) dan membudayakan (*Civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia dalam hal ini siswa (diri dan kehidupannya menjadi warganegara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya untuk membekali siswa hanya dengan dimensi rasional dan intelektual tetapi juga bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang membekali mereka dengan dimensi spiritual, emosional dan sosial sehingga nantinya mereka diharapkan mampu hidup bersosialisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar itu siswa jangan terlalu banyak diberi hal-hal yang bersifat abstrak, tetapi hal-hal yang nyata dan berguna bagi kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi dari tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

## **2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Sedangkan tujuan

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, seperti pendapat Mulysa (Eko Budi Santoso, 2012) adalah untuk menjadikan siswa:

- a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.
- b. mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan, dan
- c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.

Badan Standar Nasional Pendidikan Eko Budi Santoso, (2012:56) merumuskan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari tujuan di atas tampak terdapat 3 komponen penting yang hendak dikembangkan yaitu: warga negara yang cerdas (berpikir kritis dan berpartisipasi) dan berkarakter (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain). Dengan demikian



diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.

### 3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana diatur dalam UU NO.20 Tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan mengenai kurikulum yang diatur dalam PP No. 19/2009 diantaranya adalah tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dalam pasal 6 ditegaskan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan Dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran Agama dan akhlak mulia
  - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
  - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
  - d. Kelompok mata pelajaran estetika
  - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (Wanda Rizky Febrianto, 2011)

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian di Sd/MI/SLB/Paket A, SMP/ MTs/SMPLB/ Paket A, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK. Atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan Agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan Jasmani. Hal ini diatur dalam PP No. 19/2005 adalah berkenaan dengan kedalaman muatan Kurikulum.

Dalam pasal 8 PP No. 19/2009 ditegaskan bahwa kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan pada semester sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kompetensi sebagaimana dimaksud terdiri atas standar

kompetensi dan kompetensi dasar. Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dalam hal ini terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan menengah.

Berikut disajikan standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dalam standar Isi BSNP, (Wanda Rizky Febrianto, 2011) dijelaskan juga mengenai ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, yakni meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan Bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam Perbedaan, Cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan Negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan Jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku didalam masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan Internasional.
- c. Hak Asasi Manusia meliputi : Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong rotong, Harga diri sebagai Warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga Negara.
- e. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan Konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi
- f. Kekuasaan dan politik meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, Demokrasi dan sistim Politik, budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistim pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi Negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara, Pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai idiologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era Globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Menyadari betapa pentingnya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka dengan melalui Pendidikan Kewarganegaraan sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan ketrampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokratis.

#### **4. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan**

Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditandai dengan pemberian penekanan pada dimensi sikap dan ketrampilan kewarganegaraan. Jadi seorang warga Negara perlu memahami dan menguasai penguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep prinsip politik, hukum, dan moral kewarganegaraan. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai warga Negara yang baik dan memiliki ketrampilan berpartisipasi dalam bentuk kehidupan berbangsa

dan bernegara serta ketrampilan menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup (*life skills*).

Somantri (2011:112), memberikan gambaran tentang karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan yang masih terus harus dikembangkan baik secara ilmiah maupun Pedagogis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sebagai berikut :

- a. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian atau salah satu tujuan Pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu (*integrated*) dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen Negara, terutama pancasila, UUD1945, GBHN, dan perundangan Negara, dengan tekanan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela Negara.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, Pancasila, UUD 1945 dan dokumen Negara lainnya yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
- c. Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan secara ilmiah dan pedagogis untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi.
- d. Dalam mengembangkan dan melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan, kita harus berfikir secara integratif, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan antara pengetahuan *ekstraseptif* (ilmu), kebudayaan Indonesia, tujuan pendidikan nasional, Pancasila, UUD 1945, Filsafat pendidikan, Psikologi Pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin ilmu social dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikannya yang terdiri atas unsur: (1) tujuan pendidikan, (2) bahan pendidikan, (3) metode pendidikan, (4) evaluasi.
- e. Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan kepada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif warga negara, terutama generasi muda, dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik (*good citizen*) dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (*civic affairs*)
- f. Dalam kepustakaan asing Pendidikan Kewarganegaraan sering disebut *civic education* yang salah satu batasannya ialah “seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi”.



Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lain. Walaupun Pendidikan Kewarganegaraan termasuk kajian ilmu sosial namun dari sasaran atau tujuan akhir pembentukan hasil dari pelajaran ini mengharapkan agar siswa sebagai warga negara memiliki kepribadian yang baik, bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran karena wujud cinta atas tanah air dan bangsanya

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan dengan karakteristik seperti ini mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat, komponen pendidik dan negara. Hal ini disebabkan karena Pendidikan Kewarganegaraan banyak mengajarkan nilai-nilai pada siswanya. Nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, pengorbanan, menghargai orang lain dan persatuan ini jika di tanamkan dalam diri siswa bisa menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Siswalah yang akan menjadi cikal bakal penerus bangsa dan yang akan mempertahankan eksistensi negara maka dari itu mereka sangat memerlukan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks seperti ini